BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, membutuhkan interaksi dan relasi dengan orang lain untuk menjalani hidup dan berkembang secara alami. Ketergantungan ini menjadi dasar bagi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perkembangan pribadi dan dinamika sosial-budaya dalam masyarakat. “Manusia berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan sosial karena mereka didorong oleh berbagai motivasi kompleks. Selain mencari kepentingan bersama dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, atau politik yang saling menguntungkan, mereka juga mengikuti keinginan bersama untuk membentuk hubungan yang bermakna dan membangun komunitas yang solid. Selain itu, interaksi sosial juga dipengaruhi oleh perasaan individu seperti kebutuhan akan penerimaan, kasih sayang, pengakuan, dan keinginan untuk berbagi pengalaman serta emosi dengan orang lain. Ini mencerminkan bahwa hubungan sosial manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional yang mendalam”¹. Pada intinya, manusia butuh berinteraksi dengan orang lain untuk hidup dan berkembang untuk menjaga hubungan di kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia memerlukan adanya keluarga sebagai entitas yang menyatukan secara fisik dan spiritual antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria

---

¹ Putu Sauca Arimbawa Tusan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 2 (2017) hlm. 201.

dan wanita. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera melalui ikatan yang dikenal sebagai perkawinan².

Perkawinan harus dipahami sebagai ikatan sah yang melibatkan tanggung jawab moral dan hukum, serta memenuhi kebutuhan akan ekspresi seksual. Dalam konteks ini, perkawinan membentuk landasan bagi hubungan yang kaya akan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab. Sebagai unit dasar dalam masyarakat, perkawinan memiliki peran yang tidak hanya penting tetapi juga esensial dalam membangun dan menjaga kelangsungan peradaban manusia.

Menurut strukturnya, perkawinan merupakan pembentukan keluarga yang diakui sebagai ikatan suci atau sakral antara seorang suami dan seorang istri, yang diberkati oleh Tuhan. Konsepsi ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Sesuai hukum Islam, perkawinan adalah suatu kontrak sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan terjalinnya kesatuan keluarga yang harmonis berdasarkan asas dan peraturan yang ditetapkan oleh agama Islam. Dalam karyanya, Abror Khoirul mengangkat topik pernikahan dalam hukum

---

² Habibahi, "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler Pgsd Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik," *Journal of Elementary Education* 3, no. November (2014)hlm. 14–20.

³ Hifni, Mohammad, dkk. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil* 1, no. 1 (2016)hlm. 50.

Islam, yaitu “Akad yang sangat kuat atau *mišâqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”⁴. Ringkasnya, pernikahan dalam Hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam pernikahan, terdapat salah satu asas yaitu asas monogami, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu pasangan hidup yang sah secara hukum yang berlaku, yang berarti bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan lebih dari satu orang pada saat bersamaan. “Salah satu prinsip dasar perkawinan adalah asas monogami, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang istri tunggal. Namun, ada pengecualian terhadap aturan ini, khususnya dalam kasus di mana seorang pria pernah bercerai atau menjanda dan kemudian diizinkan untuk menikah lagi dalam jangka waktu tertentu. Prinsip monogami tidak mutlak dalam konteks ini. Asas monogami tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan.”⁵. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, asas monogami memang menetapkan seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri sah pada waktu yang sama. Namun asas monogami disini tidak bersifat mutlak dan terdapat pengecualian tertentu yang telah diatur.

Sifat monogami yang non-absolut memungkinkan terbukanya praktik perkawinan dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan, praktik yang lazim

---

⁴ Abror, Khoirul, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandar Lampung: Tim LP2M: 2016) hlm. 2.

⁵ Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” *Dialog: Jurnal Mimbar* 23, no. 2 (2007) hlm. 301.

disebut poligami. Poligami merupakan praktik yang diperbolehkan dalam konteks dan situasi tertentu.

Di Indonesia, praktik poligami diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua sumber hukum materiil ini menjadi landasan utama bagi hakim di Pengadilan Agama, terutama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur secara rinci tentang poligami dalam Pasal 3 hingga 5, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur poligami dalam Pasal 55 hingga 59. Dua peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai batasan, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melakukan poligami di Indonesia, serta menjadi pijakan hukum yang dipegang teguh dalam pengambilan keputusan hukum terkait hal ini⁶.

Pada intinya, kebolehan mengenai poligami di Indonesia diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan praktik poligami. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang terkait dengan poligami.

Mengenai tata cara pelaksanaan poligami, ketentuan terkait dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 40 mengatur bahwa “apabila seorang suami hendak mempunyai isteri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis. ke pengadilan.” Lebih lanjut dinyatakan bahwa:

Apabila belum ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan izin pengadilan, maka Pegawai Panitera dilarang mencatatkan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari satu, sebagaimana diatur

---

⁶ Abror, Khoirul, *Op.cit.*, hlm. 6.

dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975⁷.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UU Perkawinan, seorang suami harus terlebih dahulu memenuhi salah satu syarat yang disebutkan di dalamnya untuk mendapatkan izin pengadilan untuk melakukan poligami.

Syaratnya adalah sebagai berikut::

1. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. Dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan yang penyebabnya ada di pihak istri

Untuk mengajukan izin poligami, perlu memenuhi sejumlah persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut::

1. Keinginan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang harus diketahui dan mendapat persetujuan dari istri/istri-istri nya
2. Pihak suami wajib memberikan jaminan kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka ketika yang bersangkutan telah menikah lagi;
3. Adanya kemampuan pihak suami untuk menjamin dan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Namun akhir akhir ini, terdapat beberapa putusan izin poligami dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Salah satunya adalah Putusan dengan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk. Dalam putusan ini berisikan permohonan izin poligami

---

⁷ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* 1, no. 2 (2014)hlm. 18.

⁸ Edy Mulyanto, "Azas Monogami Dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya," *Law Review* 5, no. 1 (2022)hlm. 111

dengan kondisi calon istri kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam pengaturannya seorang Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menjadi istri kedua, akan tetapi majelis hakim mengabulkan izin poligami tersebut dengan alasan demi kemaslahatan antara para pihak dan komitmen kuat dari pemohon. Kemudian hal yang menarik bagi penulis disini adalah, putusan tersebut dikabulkan majelis hakim, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya konflik norma. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada informasi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat permasalahan yang terfokus pada bagaimana hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk dengan nomor perkara 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang serta rumusan masalah di atas, diharapkan ada suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan Hukum Perdata secara umum, terutama dalam konteks Hukum Keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan yang kuat untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum yang terkait dengan isu-isu keluarga. Selain itu, diharapkan juga mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap perkembangan regulasi hukum serta cara interpretasinya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam mengeluarkan putusan pengadilan khususnya putusan izin poligami.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dengan jelas maksud dari judul skripsi ini serta mempermudah dan membahas permasalahan serta untuk mencegah dari penafsiran yang berbeda, penulis perlu secara terperinci menjelaskan beberapa konsepsi yang relevan dengan judul skripsi, yaitu:

1. Analisis

Proses analisis merupakan salah satu penyelidikan dan pemeriksaan, dimana suatu objek dilakukan pemeriksaan yang lebih rinci untuk

mengidentifikasi dan memahami komponen-komponen utamanya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menarik kesimpulan dari temuan yang telah dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “analisis” berarti; n (kata benda), 1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk memastikan keadaan yang sebenarnya (termasuk sebab-sebab, dan aspek permasalahannya); 2. Penguraian suatu subjek menjadi bagian-bagian penyusunnya dan memeriksa masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pokok pembahasan; 3. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya⁹. Singkatnya, analisis adalah penyelidikan, penelaahan suatu peristiwa, pokok, atau persoalan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentangnya.

2. Putusan Pengadilan Agama

Putusan adalah hasil resmi yang dijatuhkan oleh pengadilan setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Penetapan ini menentukan penyelesaian atau penyelesaian suatu permasalahan atau perselisihan yang dibawa ke pengadilan. Dengan kata lain, putusan merupakan hasil akhir yang dicapai majelis hakim setelah mengkaji dan

---

⁹ KBBI

mempertimbangkan secara mendalam seluruh bukti-bukti yang diajukan selama persidangan..

Definisi awal “putusan” dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengartikan sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim sebagai penyelenggara negara yang diberi wewenang untuk dibacakan di pengadilan dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perselisihan antara tergugat dan penggugat. Dengan kata lain, putusan tersebut berfungsi sebagai dokumen hukum yang menjelaskan kepada pihak-pihak yang berperkara mana pihak yang salah dan pihak mana yang benar.¹⁰

Pengadilan agama merupakan lembaga hukum yang menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan keyakinan agama. Hal-hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan. Dalam mengadili hal-hal tersebut, pengadilan agama mempertimbangkan ajaran dan ajaran agama yang bersangkutan, serta hukum dan prinsip-prinsip negara tempat mereka beroperasi. Dalam hal ini agama yang dimaksud adalah Islam.

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten, kota, dan wilayah hukum yang mencakup wilayah provinsi. Pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang menganut agama Islam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹¹.

---

¹⁰ Wibisono Oedoyo, Dian Pratiwi Ayu, and Muhammad Arvin Wicaksono, “Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia,” *Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022)hlm. 1643.

¹¹ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press: 2021)hlm. 5.

3. Izin Poligami

Izin poligami adalah izin yang diberikan pengadilan kepada seorang suami untuk mengadakan perkawinan yang sah dengan lebih dari satu perempuan. Izin ini harus selaras dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Proses pengadilan menilai kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap seluruh istri dan anak, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan poligami. Dengan kata lain, izin poligami bukan sekedar persoalan prosedural, namun juga mencakup pertimbangan etika dan sosial yang mendalam terkait dengan praktik perkawinan..

Poligami dapat diartikan sebagai perkawinan dimana salah satu pihak (suami) menikah dengan lebih dari satu isteri secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan monogami, yaitu perkawinan dimana seorang suami menikah hanya dengan satu istri dalam satu waktu.¹² Dengan kata lain, poligami adalah bentuk perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini adalah suami melakukan pernikahan lebih dari satu istri dalam saat yang bersamaan,

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami yang hendak melangsungkan perkawinan poligami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin tersebut dianggap batal demi hukum.¹³

---

¹² M A Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017)hlm. 48.

¹³ Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia," *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019)hlm. 3.

F. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan sebagai alat Analisa dalam proposal ini adalah Teori Kemanfaatan, Kepastian, dan Keadilan.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah konsep dalam hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum harus jelas dan mudah dimengerti oleh semua orang. Hal ini penting agar setiap orang dapat dengan yakin mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum suatu negara.

Terwujudnya kepastian hukum dapat dicapai melalui penetapan norma yang jelas dan tidak ambigu dalam konteks suatu kerangka hukum. Hal ini, pada gilirannya, memastikan bahwa penerapan norma-norma ini juga transparan dan dapat diprediksi. Kepastian hukum pada hakikatnya tidak hanya mencakup subjek dan objek hukum itu sendiri, namun juga ancaman hukum yang mungkin timbul dalam penerapannya. Namun perlu disadari bahwa kepastian hukum bukanlah suatu keadaan mutlak yang selalu tersedia. Sebaliknya, ini merupakan konsep dinamis yang harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi spesifik dari suatu situasi tertentu, dengan mempertimbangkan prinsip manfaat dan efisiensi.¹⁴

Ini berarti bahwa aturan hukum harus terperinci mengenai siapa yang terlibat, apa yang diatur, dan apa akibatnya. Namun kepastian hukum tidak selalu menjamin setiap saat, melainkan

---

¹⁴ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha* 4, no. November (2016), hlm. 941.

menyesuaikan dengan keadaan yang memperhatikan manfaat dan efisiensi.

2. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum adalah bagaimana cara memikirkan tentang apa yang adil dalam sistem hukum. Ini mencakup berbagai konsep, seperti bagaimana sumber daya didistribusikan dengan adil, bagaimana proses hukum harus berjalan, dan bagaimana menangani masalah setelah terjadinya pelanggaran hukum. Kemudian lebih lanjut diatur bahwa:

Banyak ahli hukum yang memberikan pendapatnya mengenai apa itu keadilan yang sebenarnya. Literatur yang ada dapat memberikan gambaran mengenai makna keadilan. Pada hakikatnya fairness atau keadilan menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya, menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu bagaimana para pihak yang berhubungan satu sama lain mempertimbangkan haknya dan kemudian dihadapkan pada kewajibannya. Di sinilah berfungsinya keadilan, yaitu praktek penyelenggaraan hukum di lapangan. Ada kalanya terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Sebab, konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak.¹⁵

Dalam konteks ini, konsep keadilan berkaitan dengan cara individu berinteraksi satu sama lain sehubungan dengan hak dan kewajibannya. Seringkali praktik hukum menimbulkan kesenjangan antara kepastian hukum dan upaya mencapai keadilan, mengingat kepastian hukum pada hakikatnya merupakan gagasan yang abstrak.

---

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 944

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum adalah pandangan yang menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum dianggap berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat serta mengatasi konflik secara efisien. Menurut Gustav Rudbrach, dalam teorinya yang dikemukakan yakni teori tujuan hukum, beliau menjelaskan bahwa:

Asas kemanfaatan diartikan sebagai suatu tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berguna atau mempunyai manfaat. Pada hakikatnya hukum dirancang untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang. Negara dan hukum diciptakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan keadilan harus memperhatikan asas kemanfaatan. Contoh konkritnya adalah penerapan hukuman mati terhadap pembunuh. Dalam hal ini dapat dipertimbangkan manfaat penjatuhan pidana terhadap terdakwa sendiri dan masyarakat. Jika hukuman mati dirasa lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka dijatuhkan.¹⁶

Dalam konteks penerapan hukum, kemanfaatan hukum harus diperhatikan bersama-sama dengan asas kepastian hukum dan keadilan dengan tujuan menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat pada umumnya.

---

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 946

G. Orisinalitas Penelitian

Oleh karena penelitian tentang izin poligami yang telah banyak diteliti, maka dari itu penulis ingin memberikan kontribusi pada bidang penelitian tersebut dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama mengenai izin poligami namun dengan status istri kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mencapai hal tersebut, penulis mengkaji literatur yang telah membahas judul yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini.:

1. Marina Mulkiya Sa'ida, *Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk)*. Skripsi ini membahas bahwa dalam Putusan yang dicantumkan dalam judul tersebut, suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan belum dikaruniai seorang anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.

Perbedaan pada skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah dalam penulisan skripsi diatas terdapat perbedaan yang cukup jelas yakni dalam skripsi penulis kali ini, pemohon merupakan seorang pensiunan pegawai negeri dan calon istri kedua adalah seorang pegawai negeri yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.

2. Almazs Nachrowi, *Studi Komparatif Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dan Malaysia*. Yang menjadi objek kajian dalam skripsi yaitu bagaimana praktik poligami pegawai negeri sipil di Indonesia dan Malaysia menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun

1990 dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002.

Yang menjadi pembeda dengan penelitian kali ini adalah penulis menggunakan metode studi komparatif antara peraturan yang ada dalam satu negara dengan negara lain (dalam hal ini adalah Indonesia dengan Malaysia)

3. Fandy Wijaya, *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Pokok masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah ingin mengetahui bagaimana perspektif kajian fikih terhadap pembatasan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah luas substansi topik yang dibahas. Didalam skripsi kali ini, membahas tidak hanya berdasarkan hukum islam (fikih) saja, termasuk diantaranya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan juga ada Putusan yakni Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dirancang untuk mengkaji peraturan yang berlaku dan norma-norma yang terkait., sehingga dapat menggambarkan apakah Putusan

537/Pdt.G/2018/PA.Lwk dan berpedoman pada norma-norma dan aturan yang berlaku.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu proyek penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, mengingat pokok bahasan penelitiannya adalah penelaahan terhadap berbagai peraturan hukum¹⁷.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep digunakan untuk mencapai keseragaman pemahaman bahasa hukum dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Kesalahpahaman seorang peneliti terhadap konsep-konsep hukum mau tidak mau akan menimbulkan kesalahan dalam penelitiannya.”¹⁸.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. “Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian”¹⁹.

---

¹⁷ Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018), hlm. 207–208

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 208

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling otoritatif, termasuk peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder tersebut dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan bahan lain yang relevan yang membahas permasalahan yang akan dibahas²¹. yang kemudian nantinya akan digunakan untuk penelitian kali ini.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan analisis putusan pengadilan yang telah dibahas sebelumnya pada latar belakang.

---

²⁰ I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 3

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu sistematika penulisan yang sederhana, dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini.

- BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN UMUM**, menguraikan tentang gambaran umum Putusan Pengadilan Agama, Izin Poligami, dan Pegawai Negeri Sipil.
- BAB III PEMBAHASAN**, menguraikan tentang bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan agama dengan nomor perkara 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk.
- BAB IV PENUTUP**, merupakan jawaban langsung dari pokok permasalahan skripsi ini yang dinyatakan dalam bentuk kesimpulan dan saran.